

**PENGARUH KEBIJAKAN PRO-PASAR DALAM MENUNJANG
PENINGKATAN EKONOMI INDIA**

Oleh : Sonya Jihani Syahira

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: sonya.jihani.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know how pro market policy can take on effect in India economic matters. Initially, India is one of the poor country with closed economic condition. Now it can change the status and be the country with the good economic condition. One of the change be done by the influence of pro market and able be the magnet for foreign investors.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pasar pro dapat berpengaruh terhadap ekonomi India. Awalnya, India merupakan salah satu negara miskin dengan kondisi ekonomi yang tertutup. Sekarang India dapat mengubah statusnya dan menjadi negara dengan kondisi ekonomi yang baik. Salah satu perubahan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pro pasar yang mampu menjadi magnet bagi investor asing.

Key word: Kebijakan Pro-Pasar, Immanuel Wallstrain, International Monetary Fund, Foreign Direct Investment, Manmohan Singh

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1991 di beberapa negara Asia yang juga menimpa India pada saat itu, mengakibatkan pemerintah India mengalami keterpurukan ekonomi. India tidak memiliki cara lain selain bergabung dan menyetujui sejumlah resep yang ditawarkan oleh lembaga bantuan Internasional yaitu IMF (*International Monetary Fund*). India melakukan perjanjian dengan IMF dan organisasi lainnya yang mengharuskan kecepatan liberalisasi dan regulasi pemerintah dikurangi, terutama perdagangan internasional.

POSISI INVESTASI ASING DALAM PEREKONOMIAN INDIA

Pada tahun 2013, India mengeluarkan kebijakan baru yang memudahkan bagi investasi asing di sejumlah industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemerosotan nilai tukar mata uang. Kebijakan baru ini dicapai dalam sebuah pertemuan antara para menteri senior dan Perdana Menteri Manmohan Singh. Dalam kebijakan baru ini, pihak asing diizinkan untuk memiliki 100% usaha yang bergerak di industri telekomunikasi, naik dari sebelumnya yang mencapai 74%. (BBC, 2013)

Kinerja pemerintah India mengejar ketertinggalan ekonomi yang dilakukan dengan berbagai terobosan dari sejumlah aturan pendukung. Di tahun 2012, perusahaan-perusahaan asuransi asing dimungkinkan untuk masuk ke sektor dana pensiun. Dalam beberapa bulan terakhir, India terus berupaya melawan perlambatan ekonomi akibat krisis keuangan di Eropa dengan membuat sejumlah terobosan di bidang investasi. India juga mengizinkan perusahaan ritel menambah investasi di negara itu meski bertentangan dengan keinginan kalangan pengusaha dan pedagang lokal. Dengan aturan tersebut, para ritel transnasional berpeluang membeli saham perusahaan ritel lokal dengan porsi kepemilikan hingga 51 persen. (Koran Sindo, 2012)

Saat ini, telah banyak para ritel yang telah membuka outlet di India namun mereka tetap dituntut membuat kesepakatan tertentu dengan para peritel lokal. Menurut media BBC, Pemerintah India saat ini mempersiapkan untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani investasi dalam negeri. Menurut Menteri Keuangan India P Chidambaram sebagaimana dikutip Koran BBC, pihaknya berjanji melakukan reformasi lebih luas di sektor perbankan, asuransi dan sektor lainnya. Pemerintah India menurut P Chidambaram meyakini bahwa, pertumbuhan ekonomi negeri Bollywood akan kembali pada level 9 persen seperti tahun-tahun sebelumnya. (BBC, 2012)

Adapun porsi dana asing dalam sektor-sektor perekonomian India adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur

India mengalokasikan sekitar 10% PDB pada kegiatan pembangunan konstruksi. Pemerintah India telah berencana untuk menginvestasikan \$ 1 triliun infrastruktur 2012-2017. Sebanyak 40% dari investasi \$ 1 triliun tersebut akan dibiayai oleh sektor swasta. 100% FDI di bawah rute otomatis diizinkan di sektor konstruksi untuk kota-kota. (The Indian Express, 2014) Sementara itu, FDI di sektor otomotif meningkat sebesar 89% antara April 2014 sampai Februari 2015. (The Economic Times, 2015) India adalah produsen terbesar ke-7 kendaraan di dunia dengan 17,5 juta kendaraan per tahun. India memperbolehkan pembangunan infrastruktur 100% dari dana FDI. Sementara itu, saham mobil sebanyak 7% dalam porsi PDB India. (Invest India, 2012)

2. Farmasi

Pasar farmasi India menempati ranking 3 terbesar dalam hal volume dan 13 terbesar dari segi nilai. Industri farmasi India diperkirakan akan tumbuh sebesar 20% tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari 2015 ke 2020. (IBEF, 2016) Undang-

undang India memperbolehkan pembiayaan 100% dari FDI pada sektor farmasi. (pib.nic.in, 2014)

3. Sektor Jasa

Sektor jasa berhasil menyerap dana asing sebesar 46% pada tahun 2014-2015. Sektor jasa termasuk perbankan, asuransi, *outsourcing*, penelitian dan pengembangan, kurir dan pengujian teknologi. (The Economic Times, 2015) Pemerintah India telah menaikkan ambang batas diperbolehkannya pembiayaan sektor jasa asuransi yang berasal dari dana FDI yaitu dari semula 26% menjadi 49% pada tahun 2014. (The Times of India, 2015)

4. Sektor Kereta Api

Undang-undang India memperbolehkan pendanaan 100 % dari yang berasal dari FDI, seperti proyek kereta kecepatan tinggi, elektrifikasi kereta api, terminal penumpang, sistem transportasi mass rapid dan lain-lain. Mumbai-Hyderabad proyek kecepatan koridor tinggi adalah satu proyek kereta api terbesar di India, yang lain menjadi CSTM-Panvel koridor pinggiran kota. Proyek tersebut diharapkan dapat didanai oleh FDI dengan kebutuhan dana sebesar US \$ 13 miliar.

5. Sektor Industri Kimia

Pada tahun 2013 India mendapatkan keuntungan sebesar US \$ 155-160 miliar. Berdasarkan peraturan perundangan India, pihak asing diperbolehkan mendanai 100% pada sektor kimia. Sektor yang dikecualikan yaitu asam Hydrocynic, Fosgen, Isocynates dan turunannya. India mengharuskan lisensi lokal pada sektor produksi yang dikecualikan tersebut. Saham India di industri kimia khusus global diperkirakan meningkat dari 2,8% pada tahun 2013 untuk 6-7% pada 2023.

6. Tekstil

Tekstil merupakan salah satu penyumbang utama yang berasal dari aktifitas ekspor India. Sektor tekstil menyumbang 11% dari total ekspor India. Sektor ini telah menarik sekitar \$ 165 juta dari April 2000 hingga Mei 2015. Berdasarkan peraturan

perundangan India, sektor tekstil dapat menyerap 100% FDI. Selama tahun 2013-2014, FDI di sektor tekstil meningkat sebesar 91%. (Business Standard, 2014) Industri tekstil India terus didorong dan diharapkan mencapai hingga \$141 miliar sampai tahun 2021. (Corporate Catalyst India, 2015)

Pada 2016, India menyedot USD 25,5 miliar dalam bentuk Investasi Asing Langsung (FDI). Namun masih dipercaya sebagai negara idaman buat perusahaan multinasional, arus modal yang masuk berkurang sebanyak USD 6 miliar dibandingkan tahun 2012. Salah satu alasan terbesar adalah langkah pemerintah memperketat regulasi penanaman modal.

Munculnya Kebijakan Pro-pasar India

Di awal kemerdekaannya, India memulai program dengan menggabungkan gerakan non-blok dan sosialis, perencanaan ekonomi terpusat. India mengkompromikan antara ekstrim kapitalisme dan komunisme, memadukan unsur-unsur yang lebih baik dari kerangka demokrasi barat dengan perencanaan ekonomi China dan Uni Soviet saat itu. Doktrin yang dihasilkan saat itu secara luas dianggap sebagai sosialisme ekonomi. India selama ini dikenal sebagai negara yang relatif tertutup dan pasarnya sulit ditembus oleh pihak asing. India menggunakan kekuatan pasar yang diikuti semangat swadesi (memenuhi kebutuhan sendiri), peran pemerintah sangat dominan yaitu mengatur segalanya. Strategi ini ternyata tidak berjalan pada proses pembangunan di India, bahkan hasil yang diperoleh ialah kemiskinan. Rencana ekonomi lima tahun India pertama kali berjalan pada tahun 1951. Sepanjang dasawarsa berikutnya, negara mengambil alih sektor-sektor kunci tertentu dan menanam investasi, sementara sektor swasta lebih banyak dikontrol pemerintah. Tarif dan aturan-aturan lain diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Kemudian pada periode 1989-1991, India dinyatakan mengalami kegagalan ekonomi beserta kekacauan politik. Akibatnya, program politik lewat Repelita tidak bisa dijalankan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti terjadi kekecauan di Timur Tengah antara Irak dan Kuwait yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Akibatnya para pekerja India yang berada di Teluk Persia kehilangan pekerjaan dan kembali ke India. Hal ini mengurangi devisa yang menjadi andalan penerimaan devisa negara.

Pada tahun 1989 terjadi krisis politik yang berujung pada jatuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Vishwanath Pratap Singh, krisis politik tersebut berdampak pada terjadinya krisis neraca pembayaran di tahun 1990. Cadangan devisa untuk kebutuhan impor hanya memadai selama dua minggu. Jatuhnya pemerintahan pimpinan Chandra shekhar Singh membuat situasi perpolitikan dan ekonomi India semakin suram. Nilai mata uang India (*India foreign exchange*) merosot tajam hingga berada pada kondisi kesanggupan untuk membayar impor minyak bumi selama dua minggu saja. Keadaan India ditambah lagi dengan kekacauan domestik politik di akhir tahun 1990, terjadinya konflik agama Hindu-Muslim di Ayodya menyebabkan dampak buruk pada satabilitas pemerintahan India yang lebih luas. Akibatnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah India saat itu yang tidak dapat menyediakan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pada tahun 1991, terjadinya krisis ekonomi yang menimpa banyak negara Asia, India mengalami masalah yang serupa bahkan jauh lebih berat. Seratus sepuluh juta rakyat India terlempar ke jurang kemiskinan hanya dalam waktu dua tahun. Pada tahun yang sama, sebanyak 330 juta atau dua dari lima rakyat India dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi keuangan pemerintah India terpuruk , India mengalami inflasi sebesar 17%. Akibat kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi India menjadi lambat, tertinggal jauh dari negara-negara lain. Rata- rata pertumbuhan ekonomi India yaitu 3,0 % pertahun. Namun sejak terjadi kesulitan

neraca pembayaran tahun 1991 memaksa India harus melakukan reformasi di berbagai bidang baik ekonomi maupun non ekonomi. Manmohan Singh yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan India terpaksa meluncurkan program reformasi ekonomi yang luas.

Gejolak dalam negeri India tersebut dimanfaatkan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk menawarkan bantuan dengan dalih memulihkan keadaan perekonomian India. Dalam situasi tersebut, Pemerintah India akhirnya terpaksa mengadopsi aturan yang mengizinkan Negara untuk mencari dana dan menerima dana dari IMF. Sejak tahun 1991, India mengadopsi kebijakan pembangunan pro-pasar di masa PM PV Narasimha Rao. Di bawah kepemimpinan PM PV Nashimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Sigh pada tahun 1991, India mulai membuka diri pada dunia luar dengan melakukan liberalisasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan pro-pasar merupakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada kekuatan pasar dan akan sentuhan investasi asing, sistem perkonomian yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan dan liberalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi ini diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi masuknya modal asing pada skala yang sangat besar dan kebijakan ekonomi yang menganjurkan pada penghapusan kontrol birokrasi yang diharapkan dapat menarik modal asing dan teknologi juga fasilitas yang memudahkan pergerakan baik melalui pengurangan substansial tarif, sehingga cara ini lebih mengintegrasikan ekonomi India dengan ekonomi global. (Triwari & Shakula, 2003) Pemerintah mulai melucuti Lisensi Raja (dalam hal investasi, industri dan lisensi impor), mengakhiri monopoli negara dibanyak sektor, dan mengizinkan investor asing menggeluti bisnis domestik. Perubahan paradigma pada kekuatan pasar dan sentuhan asing membawa India menjadi kekuatan dunia.

IMF bersedia membantu India dengan catatan pemerintah India setuju untuk membuat beberapa agenda reformasi di bidang ekonomi. Tanpa bantuan pihak luar,

India diperkirakan akan bangkrut dan situasi lebih suram akan dihadapi oleh masyarakat India waktu itu. Selain menerima pinjaman dari IMF, India juga mengambil langkah dengan meminjamkan emas batangan milik negara yang berada di India ke London untuk dipinjamkan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Tiga tokoh yang terlibat dalam reformasi ekonomi pada saat itu, yaitu Narasimha Rao (Perdana Menteri), Manmohan Singh (Menteri Keuangan), dan Chidambaram.

Di bawah kepemimpinan P. V. Narasimha Rao sejarah penting integrasi ekonomi India ke ranah global dimulai. Hal tersebut bahkan menorehkan P. V. Narasimha Rao sebagai bapak Reformasi India. P. V. Narasimha Rao meluncurkan berbagai kebijakan seperti kebijakan reformasi pasar bebas di India. Melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah India saat itu dapat mengubah perekonomian India dari semula berorientasi ke dalam negeri menjadi terbuka. Hal itu mampu membuat perekonomian India tumbuh dari rata-rata 2-3% menjadi rata-rata 6%. Singh membuka perekonomian India terbuka bagi investasi asing dan memangkas hambatan perdagangan. Singh kemudian mengurangi subsidi dan melakukan swastanisasi pada sebagian perusahaan negara. Ia juga memaksa pebisnis untuk mendapatkan persetujuan pemerintah atas setiap keputusan apapun.

Investasi asing masuk, inflasi diturunkan dari 17% menjadi 8,5% yang kemudian hanya 4%. (BBC, 2011) Selama dua tahun berikutnya, pemerintah India memperkenalkan kebijakan baru hampir di setiap minggunya. Di negara yang menjalankan sistem perekonomian mirip Uni Soviet, tindakan demikian menandai awal revolusi ekonomi India. Perusahaan milik negara di bidang perbankan, penerbangan, dan industri perminyakan dibuka bagi investor mandiri. Dipimpin oleh Manmohan Singh, India melanjutkan reformasi dengan menghilangkan pembatasan antimonopoli yang berlebihan bagi perusahaan-perusahaan besar.

Singh juga menghapus kebijakan yang mengontrol secara ketat perdagangan dan industri India yang mensyaratkan adanya izin untuk setiap transaksinya. Secara garis besar, rangkaian gerbong reformasi ekonomi yang dilakukan oleh India

meliputi: (1) fiskal dan administrasi; (2) sektor finansial; (3) perdagangan internasional dan investasi; (4) sektor industri; (5) infra struktur; (6) tenaga kerja; dan (7) privatisasi. (Sandeep Ahuja,et.al, 2006)

Pada saat Manmohan Singh menjabat sebagai perdana menteri India pada tahun 2004, ia memaksimalkan kembali upaya-upaya dalam kebijakannya mereformasi sistem ekonomi dari sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi liberalis. Sementara reformasi sistem perpajakan pemerintah pusat telah terlaksana selama tahun 1990, walaupun tidak secara lengkap, namun reformasi sistem perpajakan di negara-negara bagian tidak berjalan, walaupun ada rekomendasi dari kelompok belajar yang ditunjuk oleh Pemerintahan India untuk merasionalisasi dan menyetarakan sistem perpajakan negara-negara bagian.

Kebijakan reformasi yang diadopsi pemerintah India pada saat itu baru benar-benar dirasakan dampaknya terhadap perekonomian India pada tahun 2001. Sejak saat itu terjadi peningkatan perdagangan luar negeri, aliran modal asing baik dalam bentuk PI (*Portfolio Investment*) maupun FDI (*Foreign Direct Investment*) dan aktivitas ekonomi yang mulai meningkat. Progress kebijakan liberalisasi yang diterapkan dalam hal ini telah menyebabkan meningkatnya aliran masuk investasi asing ,baik dalam hal investasi langsung (FDI) maupun portofolio investasi. Arus masuk investasi asing bervariasi antara US \$ 4 selama periode 1993-1994 menjadi 6 miliar pada tahun 2001-2002. (Abduraxmonovich, June 2003)

Sejak diluncurkannya kebijakan liberalisasi ekonomi membuat India sebagai negara utama dalam teknologi informasi (TIK) dan komunikasi dan BPO (*Business Process Outsourcing*), yang berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata 6,0 persen setahun. Pertumbuhan ekonomi kian pesat, terutama sejak tahun 2002 membuat India disejajarkan dengan China, dua negara adidaya ekonomi Asia. Program reformasi ekonomi ini meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung yang amat restriktif. Dampak kumulatif program reformasi kebijakan ekonomi berhasil

mendorong investasi swasta langsung, termasuk swasta asing, sehingga meningkat 7-8 persen dari produk domestik bruto (PDB) India dalam 4-5 tahun.

Dampak Kebijakan Propasar Terhadap Pembangunan Ekonomi India Kontemporer

Dampak yang dihasilkan dengan adanya kebijakan pembangunan pro pasar ialah dengan meningkatnya GDP (*Gross Domestic Product*) India. Berikut Tabel 1 perkembangan GDP India setelah melakukan langkah-langkah reformasi ekonomi yang dilakukan sejak tahun 1991.

Tabel 1 Pertumbuhan GDP India

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1991	1,0
1992	5,4
1993	4,7
1994	6,6
1995	7,5
1996	7,5
1997	4,5
1998	6,1
1999	8,4
2000	3,9
2001	4,9
2002	3,9
2003	7,9
2004	7,8
2005	9,2
2006	9,2
2007	9,8
2008	3,8
2009	8,4
2010	10,2
2011	6,6
2012	5,0

2013	6,9
2014	7,1
2015	7,4

Sumber: www.imf.org/external/data

Teori sistem dunia telah mampu memberikan penjelasan tentang keberhasilan pembangunan ekonomi pada negara pinggiran dan semi pinggiran. Immanuel Wallerstein, mengungkapkan bahwa sistem kapitalisme sudah menjadi sistem yang dipakai banyak Negara. (Fakih, 2001) negara-negara sosialis, yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Bagi India, kapitalisme yang terarah mendistribusikan kesejahteraan yang tercipta dengan cara secepat mungkin kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para pekerja, investor, pelanggan, pemasok, hingga kepada komunitas masyarakat. Sependapat dengan Marx, Wallstrein menganggap kaum kapitalis mengeksploitasi para pekerja di negara-negara berkembang. Akan tetapi, Wallstrein melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa adanya hubungan ekonomi vital yang berlangsung di antara negara pusat dan pinggiran. Sistem ini tidak mengeksploitasi kelompok masyarakat tertentu ataupun sumber daya alam (*a zero-sum game*), tetapi lebih condong untuk memberdayakan keduanya, yaitu jalan keadilan yang berkesinambungan. Tidak seperti konsep negara Barat, kapitalisme ala India turut pula memadukan unsur swadesi atau *self-reliance* warisan Gandhi-Nehru. Mereka tidak pula mengadopsi pola kapitalisme yang berhujung pada model perayaan materialisme dan konsumtifisme yang dapat mengancam nilai-nilai dan budaya India yang telah tertanam lama di hati Hindustan.

Berdasarkan teori sistem dunia bahwa proses kenaikan kelas yang dikemukakan oleh Wallstrein merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain serta jalan keluar bagi krisis ekonomi di India. (Budiman, 2000) India mencoba merebut kesempatan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga donor Internasional. Lembaga donor pertama yang diterima India adalah IMF.

Memfaatkan dana pinjaman dari IMF, India mulai mengejar ketertinggalan dengan masuk dalam arena pasar global serta memanfaatkan sektor-sektor andalan yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti tekstil dan produk pangan lainnya. Keputusan India dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri yang terpuruk oleh krisis politik yang berimbas pada krisis ekonomi. Menurut Wallerstein dalam kondisi perpolitikan dan ekonomi yang demikian, maka negara mengambil keputusan untuk melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri.

Teori ini dianggap berhasil dalam proses pembangunan ekonomi, dengan melakukan undangan terhadap investor asing terbukti bahwa, India mencoba mendatangkan korporasi-korporasi besar internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang saat itu di bawah 4%. India mendatangkan Coca-Cola dan Microsoft sebagai strategi menjaga terserapnya tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan yang lama menganggur akibat krisis ekonomi. (Ikawati, 2006)

Namun demikian, sembari menjaga hubungan dengan investor besar, India juga berhasil memandirikan ekonomi dalam negeri dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lebih dulu maju. India mencoba melindungi industri lokal dari serangan dan kebijakan diskriminasi global, salah satunya dengan berjuang di organisasi-organisasi internasional seperti IMF dan WTO. (Irwan, 2007)

Dalam menghadapi kekuatan-kekuatan ekonomi negara-negara maju, India tidak tinggal diam. Bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, India menentang keinginan negara-negara maju yang ingin mengeliminasi proteksi negaranya terhadap pengusaha dan industri berbasis lokal. India mengetahui bahwa lebih penting proteksi kepentingan masyarakat lokal dibandingkan membuka seratus persen selebar-lebarnya persaingan di negaranya. Walaupun saat ini saham beberapa *core industry* di India dapat dimiliki oleh asing seratus persen, tetapi untuk produk atau industri yang berkaitan langsung dengan pangan India tidak mau berkompromi. India bersikukuh bahwa Negara-negara maju tidak boleh mengintervensi industri

yang berkaitan dengan ketahanan pangan negaranya. Perjuangan tersebut terus disampaikan dalam forum-forum internasional sebagai upaya menentang keinginan Negara-negara maju.

Bagi negara secara keseluruhan, dampak positif yang terjadi amatlah besar. Roda perekonomian tumbuh begitu cepat dibandingkan yang terjadi selama beberapa dekade sebelumnya dan perusahaan-perusahaan mulai mampu memperkerjakan mereka yang sebelumnya justru tidak bekerja. Inflasi dua digit kembali dapat dikembalikan pada posisi semula. Hutang negara segera terlunasi dan foreign exchange reserve yang berharga telah pulih kembali. Krisis ekonomi terlewat dengan mulus, lampu kehidupan India masih tetap menyala. India mempunyai kebebasan sipil dan politik selama hampir satu abad, tetapi kebebasan di bidang ekonomi barulah benar-benar tercapai semenjak bergulirnya reformasi ekonomi di tahun 1991. Sejak saat itu, India terus merangkak menjadi salah satu negara maju di antara negara berkembang lainnya. Selama periode tersebut, perekonomian tumbuh secara konstan dan kesuksesan ini dibarengi pula dengan meningkatnya ekspektasi kehidupan, angka melek huruf, dan ketahanan pangan.

Saat sekarang bahwa India sedang dalam proses restrukturisasi ekonominya, kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonominya bahkan lebih penting. Dan setelah menyaksikan peran positif bahwa Investasi Asing telah memainkan dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat dari sebagian besar negara-negara Asia Tenggara dan terutama Cina, India telah memulai rencana ambisius untuk meniru keberhasilan tetangganya di timur dan sedang mencoba untuk menjual dirinya sebagai tujuan yang aman dan menguntungkan bagi FDI.

Selain itu, sejak diberlakukannya sistem liberalisasi pasar ini berdampak pada pelaksanaan hukum di India. Bahwa penegakan hukum di India sangat tegas dan jelas. Misalnya saja, perlindungan kaum buruh di India sangat maksimal. India juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara besar di dunia seperti Amerika

Serikat, Inggris dan sebagainya. India juga telah menjadi salah satu anggota dari badan perdagangan dunia (WTO).

Akibat reformasi yang diadopsi pemerintah India diawal dekade 1990-an, mengantarkan India pada perubahan luar biasa. Perubahan yang paling terasa adalah pola pikir India, karena menyimpang dari nilai-nilai tradisional yang diselenggarakan sejak kemerdekaan tahun 1947, seperti kemandirian dan kebijakan sosialistik pembangunan ekonomi, terutama karena bentuk pembatasan yang berorientasi pemerintahan, mengakibatkan keterbelakangan, isolasi secara keseluruhan dan inefisiensi ekonomi, antara sejumlah masalah lain. Meskipun fakta bahwa India selalu memiliki potensi untuk berada di jalur cepat menuju kemakmuran.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa dampak dari bergabungnya India dalam perekonomian global dapat dirasakan langsung oleh perkembangan ekonomi negara, dengan perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat, turunnya inflasi, terbukanya lapangan kerja yang luas, hutang terbayarkan serta cadangan devisa yang cukup banyak. Aset India yang meliputi sekelompok besar insinyur, ilmuwan, operator pusat layanan, akuntan, analis keuangan, teknisi medis dan profesional lain, berketerampilan tinggi dan fasih berbahasa Inggris, juga merupakan faktor pendorong majunya perekonomian India. Sebelum india menerapkan liberalisasi ekonomi, sektor telekomunikasi merupakan usaha yang dimonopoli oleh negara, sehingga tidak ada persaingan dan terkesan monoton karena pasar tidak melakukan inovasi produk yang membuat konsumen jenuh atau bosan. Namun adanya pasar bebas membuat *private sector* dan investor asing ikut terlibat dalam sektor telekomunikasi, dengan adanya inovasi produk yang dilakukan oleh mereka membuat sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang signifikan dan dilirik oleh banyak investor asing karena *telecommunication services* telah menjadi usaha yang menjamur di India. Dengan kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut, India menjadi salah satu negara yang kekuatan ekonominya diperhitungkan bersama dengan AS dan China.

Globalisasi berperan cukup besar dalam kebijakan liberalisasi yang diterapkan oleh India ini karena apabila tidak ingin tertinggal jauh dengan negara-negara maju lainnya, India harus meninggalkan kebijakan isolasi dari Negara lain tersebut dan harus membuka dirinya dalam perdagangan dunia. Karena dengan adanya pasar bebas, India dapat berintegrasi dengan negara-negara lainnya dan semakin terintegrasi dengan sistem perdagangan dunia yang ada. Namun yang menjadi perhatian selanjutnya adalah, kemiskinan yang menjadi kendala bagi India tidak lantas dapat teratasi juga meskipun dengan menjamurnya investasi luar negeri ini.

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan perubahan kondisi yang terjadi di India dari pra-reformasi sampai dengan pasca-reformasi. Perbedaan yang mencolok terlihat di bidang ekonomi. Peningkatan ekonomi menjadi pesat karena India memberi keterbukaan terhadap pihak asing. Ketika India masih terisolasi, sebenarnya pihak asing sudah menjadikan India sebagai sasarannya. Dapat dikatakan demikian karena India merupakan negara berkembang yang memiliki warga miskin banyak sehingga sangat mudah sekali untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Ketika terjadi liberalisasi ekonomi, negara maju semakin berlomba-lomba menanamkan investasinya.

FDI di India menunjukkan bahwa arus masuk yang sangat terkonsentrasi di beberapa wilayah India mampu menawarkan pasar domestik yang besar, tenaga kerja murah dan infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, walaupun FDI mengalir deras ke India, apabila arusnya terkonsentrasi ke wilayah-wilayah yang unggul saja, tetap tidak akan memberikan solusi bagi usaha pengentasan rakyat dari kemiskinan dan yang merasakan dampak positif dari besarnya arus FDI hanyalah orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu yang sebenarnya kondisinya sudah baik atau cukup makmur, sedangkan orang miskin tidak merasakan dampak baik arus masuknya FDI ini secara utuh dan maksimal.

PENUTUP:

Dengan menerapkan kebijakan pro-pasar perekonomian India menjadi lebih liberal, dimana mengubah orientasi negara dengan substitusi impor menjadi lebih terbuka. Liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi yang dilakukan di tahun 1991, membawa perubahan India dari ekonomi dengan kontrol negara menjadi ekonomi yang berbasis pada kekuatan pasar. Peran pemerintah hanya sebagai regulator ekonomi, sehingga kondisi ini mengakibatkan industrialisasi, investasi dan perdagangan di India bergerak secara dinamis.

Pemerintah India melalui kebijakannya melakukan privatisasi perusahaan publik, memperkuat hukum, melindungi hak kekayaan intelektual, memberlakukan kebijakan liberalisasi pasar. Kebijakan tersebut menarik minat para investor untuk melakukan investasi di India. Perubahan kondisi yang terjadi di India dari pra-reformasi sampai dengan pasca-reformasi memiliki perbedaan yang mencolok terlihat dalam bidang ekonomi. Peningkatan ekonomi menjadi pesat karena India memberi keterbukaan terhadap pihak asing. Ketika terjadi liberalisasi ekonomi, negara maju semakin berlomba-lomba menanamkan investasinya. GDP India terus mengalami peningkatan melalui *Foreign Direct Investment (FDI)*, hal ini dikarenakan mulai banyaknya investor yang menanamkan modalnya di India. Tidak hanya itu negara juga melakukan reformasi pajak yaitu melalui pengurangan tingkat pendapatan pajak bagi para investor yang mau menanamkan modalnya di India.

Referensi :

The Economic Times. (2015, Juni 15). *FDI inflows in services sector increased by 46 per cent in 2014-15: Department of Industrial Policy and Promotion data.*

Retrieved Maret 22, 2016, from

<http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/fdi-inflows-in-services-sector-increased-by-46-per-cent-in-2014-15-department-of-industrial-policy-and-promotion-data/articleshow/47662695.cms>

- Abduraxmonovich, A. O. (June 2003). *Economic Cooperation between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan*. RIS DISCUSSION PAPERS.
- BBC. (2011, February 4). *India's economic growth under 'threat' from inflation*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.bbc.co.uk/news/business-12363201>
- BBC. (2012, Oktober 3). *India Finance Minister Chidambaram promises more reforms*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-19814874>
- BBC. (2013, Juli 17). *India Permudah Investasi Asing*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.bbc.com/indonesia>
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Business Standard. (2014, Agustus 15). *FDI in textile sector up 91% in 2013-14*. Retrieved Maret 22, 2016, from http://www.business-standard.com/article/news-ians/fdi-in-textile-sector-up-91-percent-in-2013-14-114081500556_1.html
- Corporate Catalyst India. (2015, Juli). *A Brief Report On Textile Industry In India*. pp. www.cci.in/pdfs/surveys-reports/Textile-Industry-in-India.pdf.
- Fakih, M. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghosh, P. P. (2007, Juli). *Inequality in India: A survey of recent trends*. p. http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp45_2007.pdf.
- IBEF. (2016, Februari). *Indian Pharmaceutical Industry*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india.aspx>
- Ikawati, Y. (2006). *Membangun Kekuatan Ekonomi dari Lembah Silikon*. Kompas. indianbusiness.nic.in. (2015, Oktober). *Foreign Direct Investment*. Retrieved Maret 22, 2016, from

- http://indiainbusiness.nic.in/newdesign/index.php?param=investment_landing/247/1
- Invest India. (2012). *Automobile*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.investindia.gov.in/automobile-sector/>
- Irwan, S. (2007). *India: Bankitnya Raksasa Baru Asia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Koran Sindo. (2012, Oktober 5). *India buka investasi asuransi asing*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://ekbis.sindonews.com/read/677171/35/india-buka-investasi-asuransi-asing>
- pib.nic.in. (2014, Desember 24). *Review of the policy on Foreign Direct Investment in Pharmaceutical Sector – carve out for medical devices*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114030>
- Sandeep Ahuja, et.al. (2006, January). *Economic Reform in India Task Force Report*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://harris.uchicago.edu/sites/default/files/IPP%20Economic%20Reform%20in%20India.pdf>
- Sarah, Y. T. (20 August 2008). Comparing Trade Performance Of China And India. *EAI Background Brief No. 398*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131618-T%2027561...Metodologi.pdf>.
- The Economic Times. (2015, Mei 25). *FDI in automobile sector up 89% in April-February FY'15*. Retrieved Maret 22, 2016, from http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-25/industry/62624695_1_automobile-sector-fdi-policy-passenger-car
- The Hindu. (2014, September 21). *Make in India' pitch from Sept. 25*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://www.thehindu.com/business/Economy/modi-to-launch-make-in-india-campaign-on-sep-25/article6422804.ece>
- The Indian Express. (2014, Oktober 29). *Government relaxes FDI norms for construction, real estate sector*. Retrieved Maret 22, 2016, from

<http://indianexpress.com/article/business/economy/government-relaxes-fdi-norms-for-construction-real-estate-sector/>

The Times of India. (2015, Oktober 7). *Six insurance companies evince interest to raise FDI cap to 49%*. Retrieved Maret 22, 2016, from <http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Six-insurance-companies-evince-interest-to-raise-FDI-cap-to-49/articleshow/49257138.cms>

Triwari, S., & Shakula, N. (2003). *Market Promotion Policies in India*. New Delhi: Sarup and Sor.